

LEVEL KINERJA

**Kinerja
Strategis
Daerah**

Agis Bidang Urusan

**Indikator
Tujuan**

**Tujuan
renstra**

Sasaran

Kinerja Strategis Asisten

Kinerja Strate

Target

Sasaran

Program

Target

Indikator
Sasaran

Kinerja Taktikal/Manajerial

Target

**Indikator
Kegiatan**

Anggaran

Kegiatan

**Sasaran
Kegiatan**

Bagian

asional

Sasaran Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kinerja Operasional

Indikator Sub Kegiatan/ IKI

Target

Anggaran

Bina mental

kesos

kesmas

Tujuan:

Sasaran:

Indikator Sasaran:



**Meningkatnya Kualitas Pe
Pemerintahan Da**

Status Kinerja EPI

Tinggi/ Status

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESE

Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyeleng

Indikator:

- 1. Ketepatan waktu penyampaian L**
- 2. % Keterisian IKK**

- 1. 100/ Nilai**
- 2. 100 Persen**

Pemerintahan

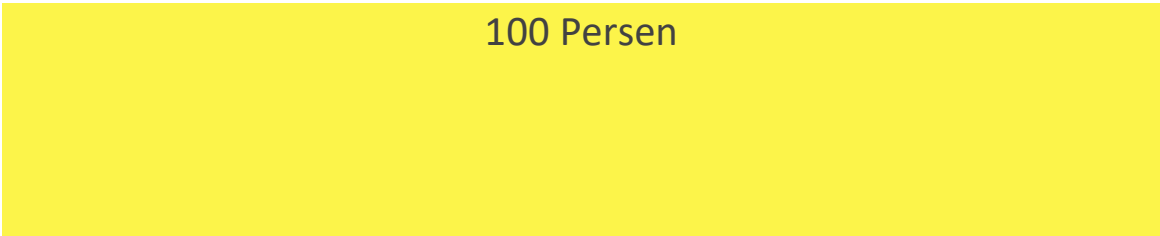
Administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas

Administrasi Tata Pemerintahan

546.085.000,00

% administrasi tata pemerintahan yang baik

100 Persen



1. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan
2. Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemerintahan
3. Terlaksananya fasilitasi penataan batas wilayah dan Penyelenggaraan nama rupabumi
4. Terlaksananya fasilitasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan Otonomi daerah

1. Penataan Administrasi Pemerintahan
- .2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

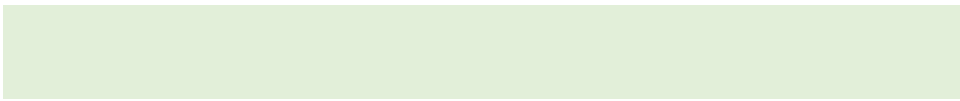
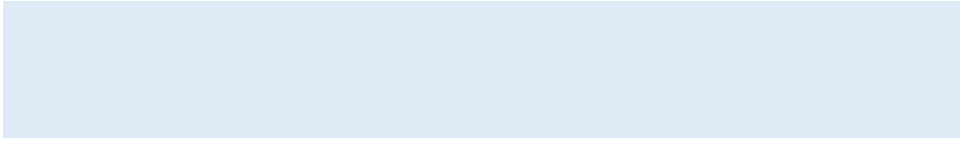
1. Jumlah Dokumen fasilitasi dan koordinasi pembinaan kecamatan yang tertib Administrasi Pemerintahan
2. Jumlah dokumen Fasilitasi administrasi pemerintahan
3. Jumlah Dokumen Fasilitasi administrasi kewilayahan
4. Jumlah Dokumen penyelenggaraan nama rupabumi yang termutahirkan
5. IKK setiap urusan Pemerintahan yang lengkap dan sesuai pedoman
6. Jumlah PD yang melaporkan LKPj yang lengkap dan sesuai pedoman
7. Jumlah PD yang melaporkan SPM yang lengkap dan sesuai pedoman
8. Jumlah dokumen hasil fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD

1. 1 Dokumen
2. 5 Dokumen
3. 5 Dokumen
4. 5 Dokumen
5. 126 IKK
6. 27 Perangkat Daerah
7. 8 Perangkat Daerah
8. 2 Dokumen

122.888.000,00

147.816.000,00

275.381.000,00



nyelenggaraa
aerah

PD

PERKARA RAJAH RAKYAT

Perwakilan Pemerintahan Daerah

Laporan SILPPD

Kerjasama daerah yang berkesinambungan

Fasilitasi Kerjasama Daerah

107.232.700,00

% kerjasama daerah yang ditindaklanjuti

100 Persen



1. Terlaksananya Fasilitasi kerjasama daerah
2. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kerjasama daerah

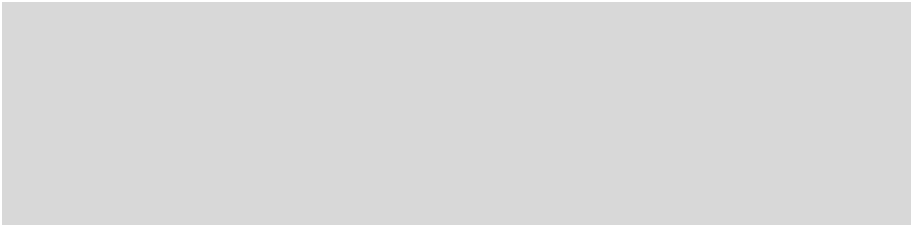
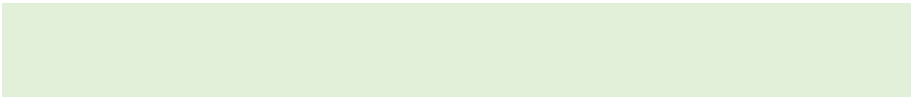
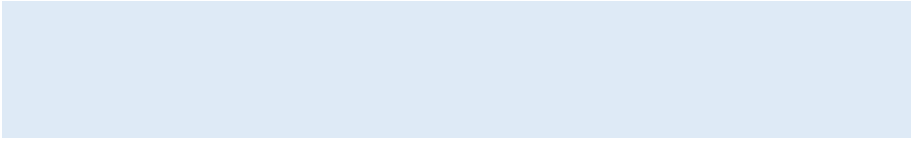
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri


1. Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama daerah
2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kerjasama daerah

1. 5 dokumen

2. 2 Dokumen

107.232.700,00





Meningkatnya Kualitas kebijakan

Indikator:

Indeks Kualitas Kebijakan

65 / Nilai

Meningkatnya koordinasi pengukuran kualitas Kebijakan

% Ketepatan waktu pengisian instrumen
IKK

100 Persen

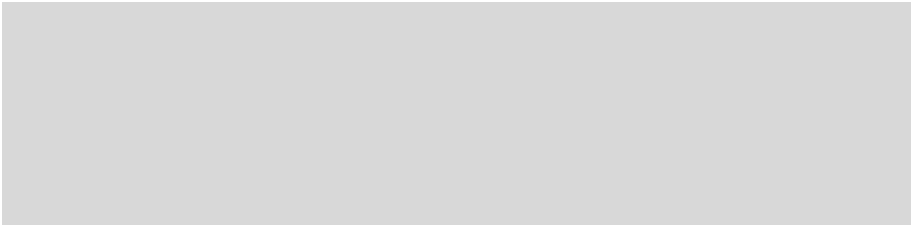
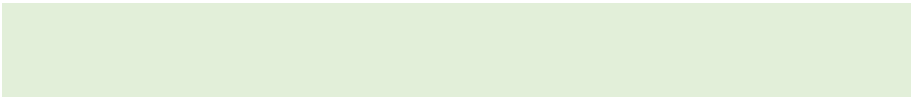
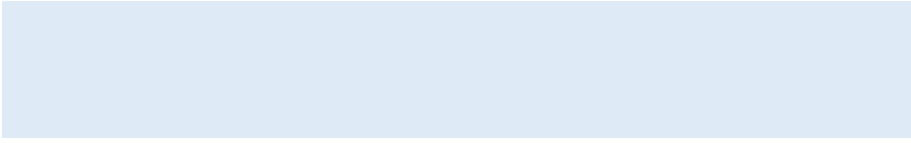
Terlaksananya pendampingan pengukuran kualitas kebijakan

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah pendampingan pengukuran kualitas kebijakan

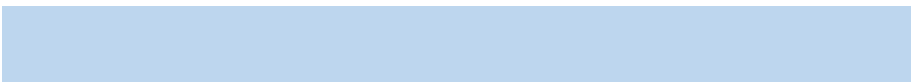
4 Rapat

339.659.600,00





2. F



Meningkatnya Koordinasi dengan
Kementerian Hukum untuk
melakukan harmonisasi regulasi

Fasilitasi dan Kc

% Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan
Produk Hukum Daerah inisiatif pemerintah
daerah

100 Persen

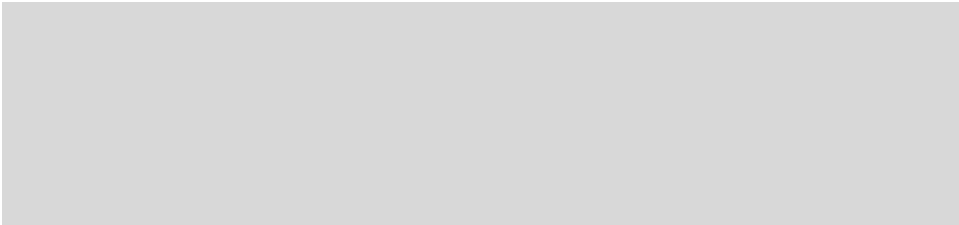
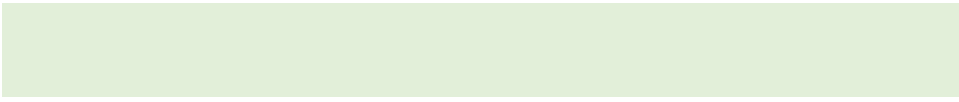
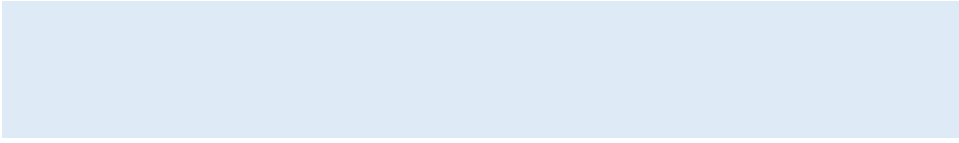
1. Terlaksananya fasilitasi pembentukan produk hukum daerah
2. Tersedianya Dokumen Permohonan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah
3. Terlaksananya Koordinasi tindaklanjut hasil harmonisasi
4. Penyusunan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

1. Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan PHD
2. Jumlah Dokumen Permohonan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah
3. Jumlah Koordinasi tindaklanjut hasil harmonisasi
4. Jumlah dokumen penjelasan Bupati dalam proses pembentukan Peraturan Daerah

- 1. 500 Dokumen**
- 2. 7 Dokumen**
- 3. 7 Rapat**
- 4. 10 Dokumen**

339.659.600,00





**1.PROGRAM PEMERINTAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEI**



Hi

Meningkatnya kompetensi
perancang Peraturan Perundang-
undangan

koordinasi Hukum

% Perancang Peraturan Perundang-undangan
yang meningkat kompetensinya

100 Persen

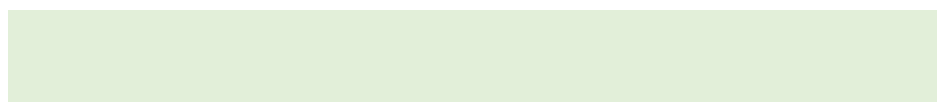
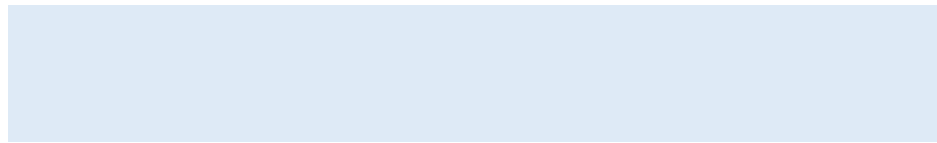
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan
Kompetensi

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah PNS yang difasilitasi Pengembangan
Kompetensinya

1 Orang

339.659.600,00



Terwujudnya tata kelola

Indeks Reforma



**UJIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pemerintahan Daerah Kabupaten**



Indikator: Kualitas regulasi daerah dan perlindungan



Indikator:

Indeks Reformasi Hukum

87 / Nilai

ukum

Terselenggaranya Evaluasi Produk
Hukum Daerah sesuai ketentuan

893.353.800,00

% Pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum
Daerah sesuai ketentuan

100 Persen

1. Tersedianya Daftar Produk Hukum Daerah yang dievaluasi
2. Terlaksananya rapat koordinasi evaluasi produk hukum daerah

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

1. Daftar Produk Hukum Daerah yang dievaluasi
2. Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah

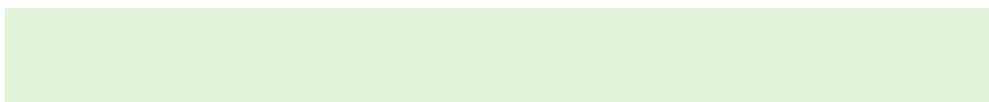
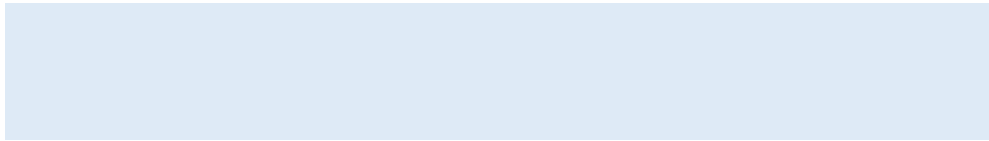
1. 20 Dokumen

2. 20 Laporan

339.659.600,00

553.694.200,00

CASCADING NINERJ

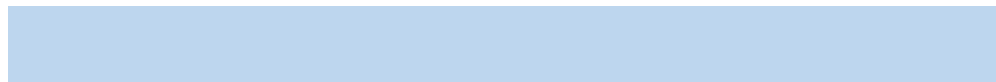


a birokrasi yang baik

si Birokrasi



I/KOTA



Terlaksananya penataan database produk hukum daerah

1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

581.234.200,00

1. % pelaksanaan penataan database produk hukum daerah
2. Nilai pengelolaan JDIH

1. 100 Persen
2. 88/ Nilai

1. Dokumentasi produk informasi hukum daerah yang mutakhir dan akurat
2. Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah
3. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

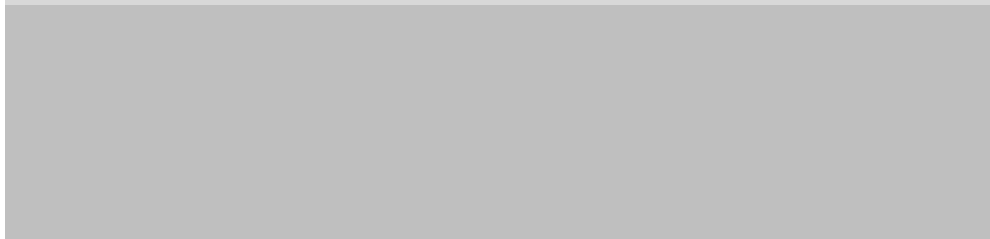
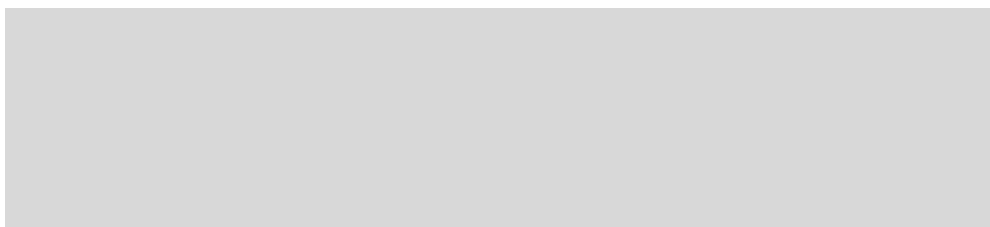
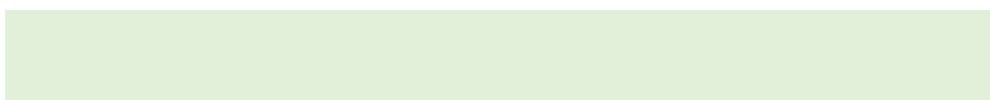
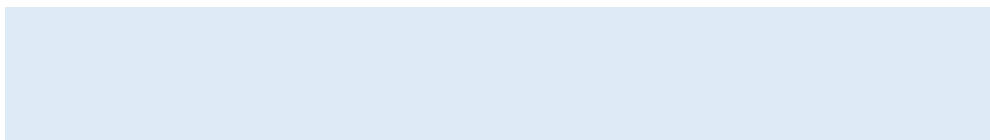
1. Jumlah produk hukum dan informasi pengelolaan hukum yang didokumentasikan
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi
3. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 1. 400 Dokumen**
- 2. 24 Kegiatan**
- 3. 22 Buku**

27.540.000,00

553.694.200,00

Α ΓΕΝΙΚΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



N



Terlaksananya Perlindungan Hukum

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

649.551.800,00

% Fasilitasi Bantuan Hukum

100 Persen

1. Terlaksananya perlindungan hukum
2. Terlaksananya fasilitasi kontrak drafting

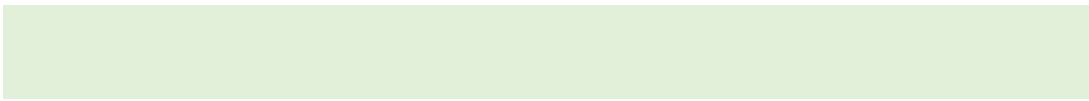
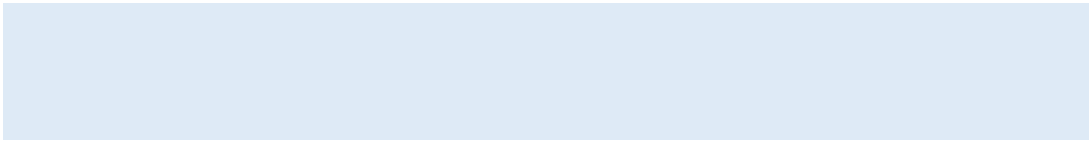
Fasilitasi Bantuan Hukum

1. Jumlah perkara yang mendapat fasilitasi bantuan hukum
2. Jumlah kontrak drafting yang di fasilitasi

- 1. 12 Perkara**
- 2. 55 Dokumen**

649.551.800,00

KADUFATEIN DAN JAK TAPU



1eningkatnya kualitas RB Gei

Nilai RB General

62/Nilai

PROGRA

**Meningkatkannya kualitas pelayanan
publik**

Indeks Pelayanan Publik

4,5 / Indeks

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten

86,70/ Indeks

1. Terlaksananya Penyusunan Proses Bisnis Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan
2. Terlaksananya Penyusunan SP dan SOP Pelayanan Publik yang sesuai ketentuan
3. Meningkatnya kualitas laporan SKM dan FKP Perangkat daerah yang sesuai ketentuan

1. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

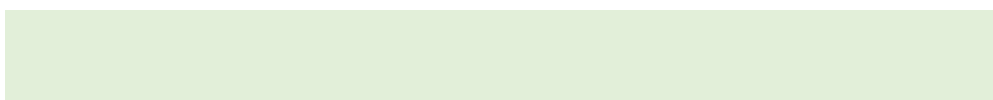
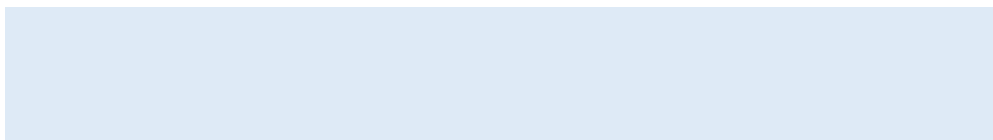
1. Jumlah PD yang menyusun Proses Bisnis
2. Jumlah PD yang menyusun SOP dan SP sesuai ketentuan
3. Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan SKM
4. Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan FKP

1. 25 Perangkat Daerah
2. 25 Perangkat Daerah
3. 30 Perangkat Daerah
4. 20 Perangkat Daerah

445.510.500,00

81.164.000,00

IN 2023-2029



neral



MANIPULASI PENUNJANG URUSAN PEMERINTA

**Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah pada
komponen Pelaporan Kinerja**

Indikator:

**Nilai SAKIP Komponen Pelaporan
Kinerja**

11/ Nilai

Organisasi

Meningkatnya Kualitas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Penataan Organisa

% Rekomendasi Hasil Evaluasi Menpanrb yang
ditindaklanjuti

75%

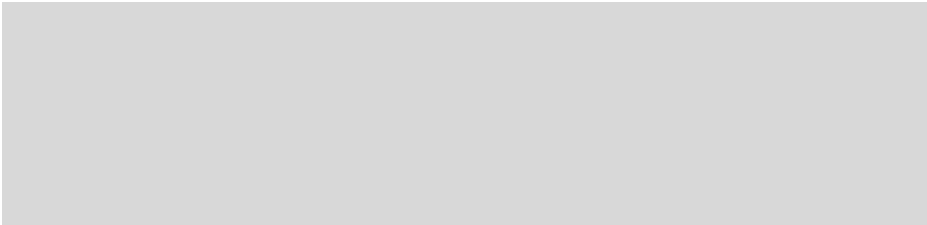
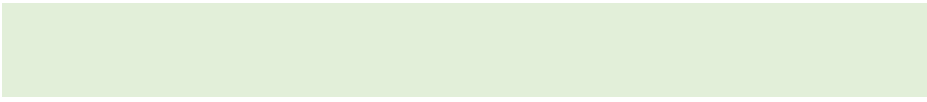
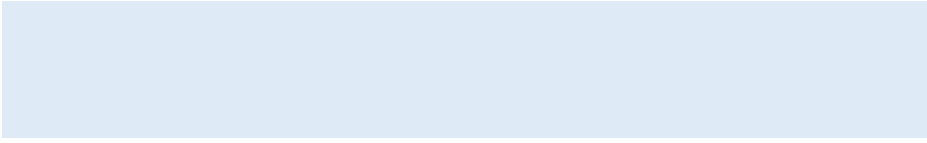
1. Tersedianya Data dan Informasi Kinerja yang Update
2. Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah

1. Jumlah perangkat daerah penanggungjawab sasaran strategis yang menyampaikan data dan informasi kinerja yang update
2. Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja sesuai standar regulasi

- 1. 10 Perangkat Daerah**
- 2. 45 Perangkat Daerah**

95.860.000,00





...HAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



Meningkatnya implementasi p

Persentase implementasi pe

50 Pers

Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

isi

% Pengelolaan RB sesuai ketentuan

75%

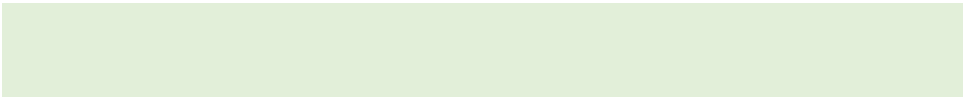
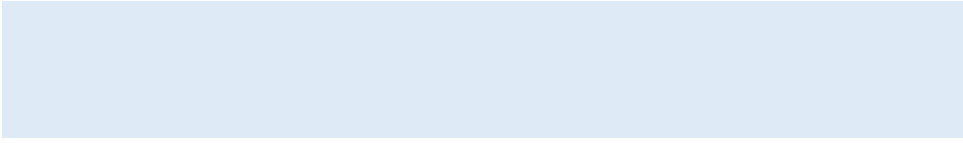
Meningkatnya implementasi pelaksanaan
Rencana Aksi RB

Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi

Jumlah Perangkat Daerah penanggung jawab Rencana
Aksi RB yang mengimplementasikan rencana aksinya

1. 15 Perangkat Daerah

346.949.800,00





penyederhanaan Birokrasi

enyederhanaan Birokrasi

en

Meningkatnya Penataan Kelembagaan berbasis kinerja

1.128.768.100,00

% Kematangan PD dengan kategori tinggi

75%

1. Terlaksananya penyusunan ANJAB ABK
2. Terlaksananya Monev Kelembagaan
3. Terlaksananya Penyederhanaan Struktur Organisasi

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

1. Jumlah PD yang menyusun ANJAB ABK dengan baik
2. Jumlah Laporan Monev kelembagaan
3. Jumlah dokumen penetapan SOTK Perangkat Daerah yang disederhanakan

- 1. 46 Perangkat Daerah**
- 2. 1 Laporan**
- 3. 23 Dokumen**

159.283.800,00



Me

Terpenuhinya kematangan
unit kerja pengadaan barang
dan jasa (UKPBJ)

Level Kematangan UKPBJ

Level 3 (Proaktif)



Terlaksananya Tingkat Kematangan
UKPBJ

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa

Jumlah Domain kematangan UKPBJ

4 Domain

247.777.000,00



PROGRAM PEREKONOMIAN



Indikc

Indeks Tata Kel

81 / In

Meningkatnya Pemanfaatan sistem pengadaan

% Pemanfaatan Sistem Pengadaan



23 Persen

1. Terlaksananya Layanan Pengelolaan Pengadaan secara Elektronik yang Tepat Waktu
2. Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai ketentuan

1. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Jumlah Laporan RUP yang diumumkan oleh Perangkat Daerah
2. Jumlah laporan fasilitasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
3. Jumlah Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

- 1. 2 Laporan
- 2. 5 Laporan
- 3. 46 Perangkat Daaerah
- 4. 5 Laporan

214.509.050,00

214.509.050,00

114.174.000,00

114.174.000,00



AN DAN PEMBANGUNAN



tor:

ola Pengadaan

deks

Pengadaan Barang

Meningkatnya kualifikasi
dan kompetensi SDM PBJ

Pengelolaan Pengadaan
Jasa

% Kualifikasi dan Kompetensi SDM
PBJ

60 Persen



Terpenuhinya keterisian formasi
jabatan fungsional PBJ

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa

Jumlah JF Pengelola PBJ sesuai
kompetensi

15 Orang

247.777.000,00



Barang dan Jasa

Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Barang dan

% Layanan Barang/Jasa Pemerintah

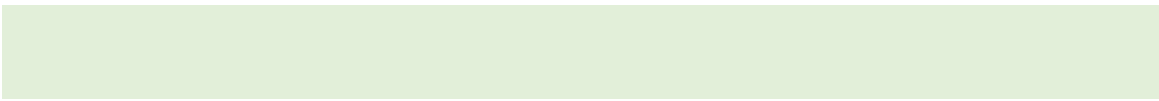
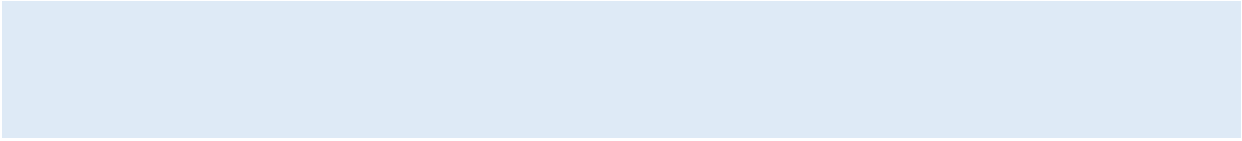


100 Persen

Terlaksananya Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah Dokumen Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

4 dokumen



Meningkatnya kua

Nilai RB T

14 / N

PROGRAM PEREKONOMIA

**Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam
Negeri**

Indikator:

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

90 Persen

Meningkatnya Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

1.152.920.100,00

% Perangkat Daerah yang mengimplementasikan penggunaan
produk dalam negeri (PDN).

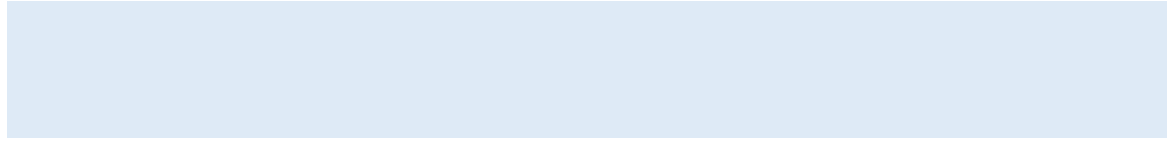


Terlaksananya Laporan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah laporan paket pengadaan yg mencantumkan persyaratan PDN

1 Laporan



alitas RB Tematik

ematik

ilai

N DAN PEMBANGUNAN

**Meningkatnya implementasi rencana aksi
inflasi**

Indikator:

% Implementasi Rencana aksi inflasi

100 persen

Meningkatnya kualitas kebijakan stabilitas perekonomian daerah

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

1. % kebijakan pengendalian inflasi yang ditindaklanjuti
2. % kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti

1. 100 Persen
2. 100 Persen

1. Pengendalian inflasi yang semakin sinergis
2. Terlaksananya kebijakan perekonomian ditindaklanjuti
3. Terlaksananya kebijakan SDA yang ditindaklanjuti

1. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

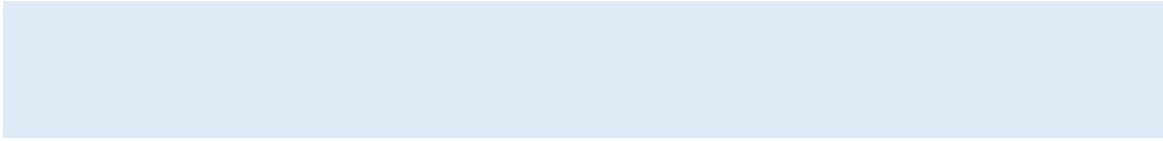
1. Jumlah agenda pengendalian inflasi yang dijalankan
2. Jumlah kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti
3. Jumlah kebijakan SDA yang ditindaklanjuti

- 1. 6 Agenda**
- 2. 4 Dokumen**
- 3. 3 Dokumen**

230.095.600,00

21.068.000,00

33.910.000,00



Meningkatnya k

% BUMD ya

50 Pers

PROGRAM PEREKONOMIAI

Meningkatnya Kinerja Keuangan BUMD

Indikator:

% Peningkatan Deviden BUMD

20 persen

Ekonomi dan SDA

RKAP yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Pelaksanaan Kebijakan

% RKAP yang dilaksanakan BUMD



100 Persen

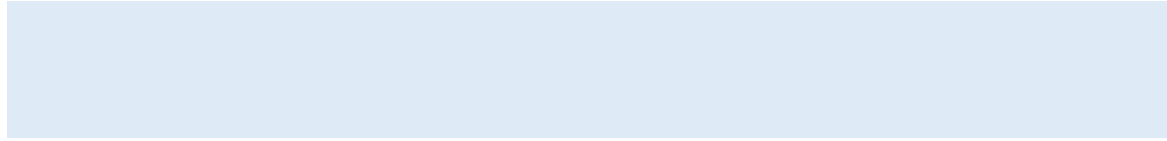
1. Terlaksananya Koordinasi Perumusan Kebijakan BUMD
2. Terlaksananya fasilitasi, monev dan pelaporan RKAP

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan BUMD dan BLUD

1. Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan BUMD
2. Jumlah dokumen kegiatan monev RKAP

- 1. 4 Dokumenten**
- 2. 16 Dokumenten**

417.778.700,00



ng Sehat

sen

N DAN PEMBANGUNAN

**Meningkatnya Transparansi dan
akuntabilitas dalam operasional BUMD**

Indikator:

**% BUMD yang mendapat opini Wajar/WTP (Wajar
Tanpa Pengecualian)**

50 Persen

Meningkatnya Kepatuhan terhadap regulasi

n Perekonomian

% temuan audit yang ditindaklanjuti

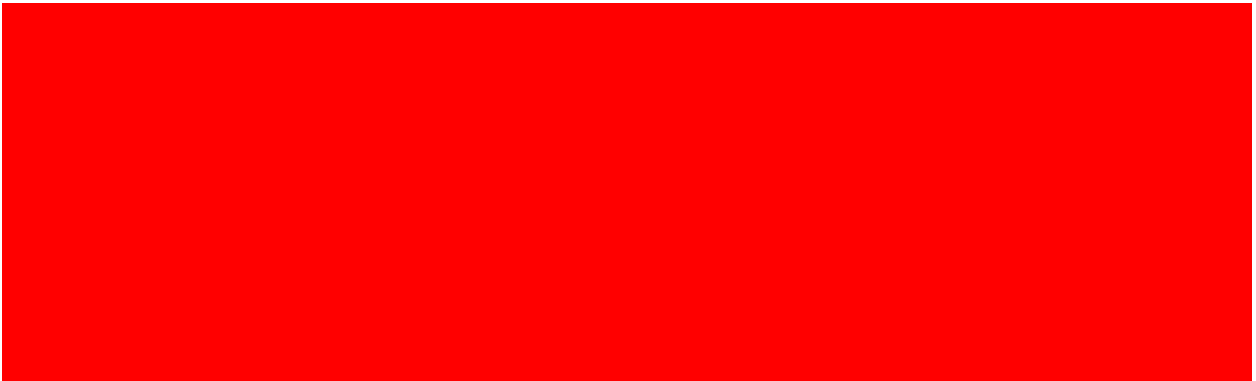
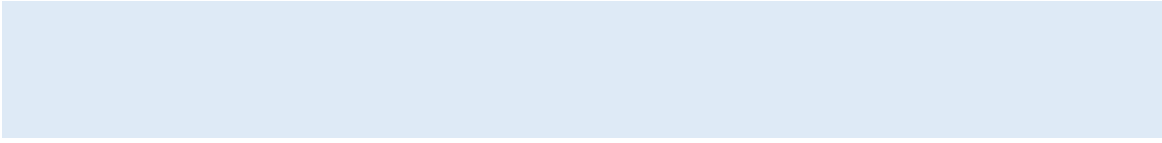


50 Persen

Terlaksananya fasilitasi, monev dan pelaporan Kepatuhan terhadap regulasi

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Jumlah dokumen kegiatan monev Kepatuhan terhadap regulasi



PROGRAM PEMERINTAHAN DA

Optimalnya layanan di Bidang

Indikator

% Kebijakan Layanan Bidang

100 Per

KESEJAHTERAAN

Fasilitasi pendanaan hibah Bidang Kesra tepat sasaran

Pelaksanaan Kebijakan Ke

% Dana hibah tepat sasaran

100 Persen



1. Terlaksananya verifikasi dan pemantauan Hibah pada kebijakan bina mental spritual
2. Terlaksananya verifikasi dan pemantauan Hibah pada kebijakan Kesejahteraan masyarakat
3. Terlaksananya verifikasi dan pemantauan Hibah pada kebijakan Kesejahteraan sosial

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan

1. Jumlah laporan verifikasi dan pemantauan pada kebijakan Mental-spritual
2. Jumlah laporan verifikasi dan pemantauan pada kebijakan kesejahteraan masyarakat
3. Jumlah laporan verifikasi dan pemantauan pada kebijakan kesejahteraan sosial

- 1. 1 Laporan
- 2. 1 Laporan
- 3. 1 Laporan

21.905.461.000,00

4.707.450.000,00

6.470.750.000,00

42.896.974.000,00
21.905.461.000,00

20.991.513.000,00

4.747.400.000,00

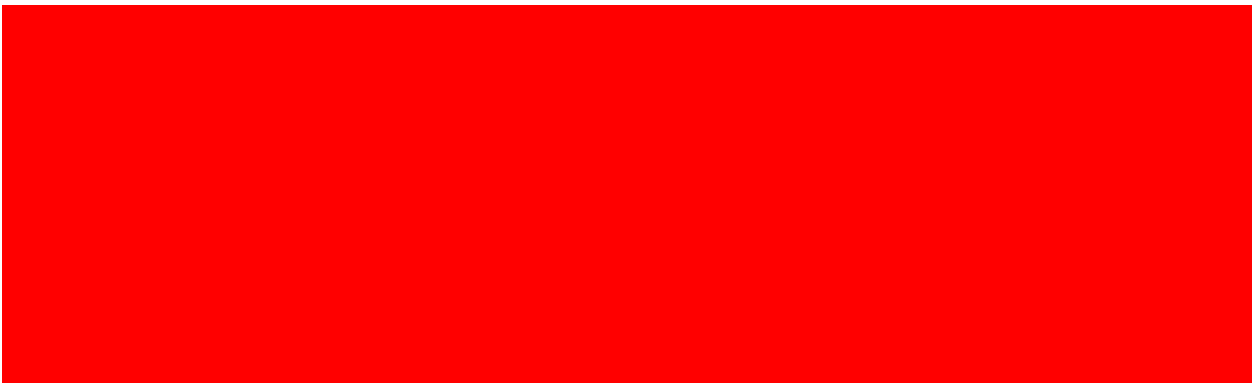
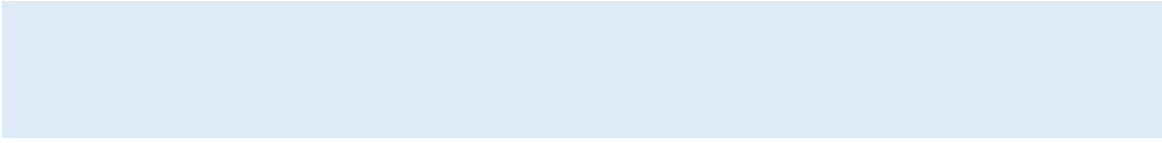
4.707.450.000,00

39.950.000,00

6.559.383.500,00

6.470.750.000,00

88.633.500,00



AN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ng Kesejahteraan Rakyat

or:

ng Kesra berjalan baik

sen

AN RAKYAT

Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Kesra

asejahteraan Rakyat

54.203.757.500,00

% Fasilitasi kegiatan layanan masyarakat bidang kesra

100 Persen

1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan Bina mental-spiritual
2. Terlaksananya fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial
3. Terlaksananya fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Masyarakat

n Sosial
n Masyarakat

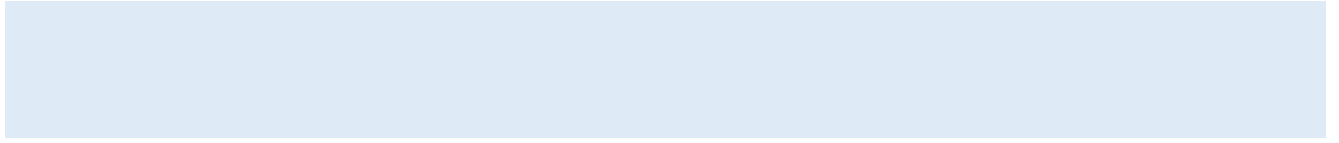
1. Jumlah Laporan fasilitasi kegiatan bina mental spiritual tepat sasaran
2. Jumlah Laporan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial
3. Jumlah Laporan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Masyarakat

- 1. 9 Laporan
- 2. 4 Laporan
- 3. 4 Laporan

20.991.513.000,00

39.950.000,00

88.633.500,00



PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

**Layanan administrasi Pembangunan yang
berkualitas**

Indikator:

**% Pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan kategori
baik**

100 Persen

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pelayanan Administrasi Pembangunan sesuai ketentuan

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

102.606.200,00

- 1.% Paket Pekerjaan PD sesuai dengan Perjanjian
2. % Realisasi Fisik keuangan PD dengan nilai deviasi kurang dari 5 %
2. % Kebijakan Pembangunan Yang ditindaklanjuti

1. 100 Persen
2. 100 Persen
3. 100 Persen

1. Terlaksananya Fasilitasi penyusunan program pembangunan
2. Terlaksananya administrasi pengendalian pembangunan
3. Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

1. Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunan program pembangunan
2. Jumlah Laporan kegiatan pengendalian pembangunan
3. Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan PD yang tepat waktu

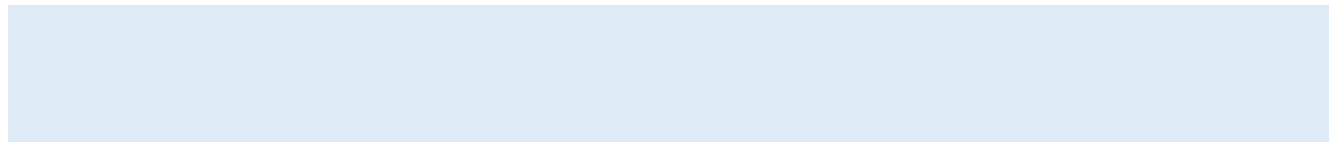
- 1. 4 Dokumen**
- 2. 4 Laporan**
- 3. 2 Laporan**

46.325.500,00

39.139.700,00

17.141.000,00

eni



ngkatkannya Kualitas Pelayanan

IKM Sekretariat Daerah

Baik/ Kategori

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan operasional bagi pimpinan daerah

Indikator:

% Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan berjalan dengan lancar

100 Persen

PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Pelayanan kepada pimpinan daerah dan keprotokolan yang semakin berkualitas

1. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

% layanan kepada pimpinan daerah dan keprotokolan sesuai standar pelayanan dan SOP

100 Persen

1. Terlaksananya Layanan keprotokolan sesuai standar
2. Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang baik
3. Tersedianya dokumentasi kegiatan pimpinan
4. Terlaksananya Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH

1. Fasilitasi Keprotokolan
2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Jumlah Laporan layanan keprotokolan sesuai standar
2. Jumlah Laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3. Jumlah Laporan dokumentasi kegiatan Bupati/Wabup dan Pejabat Pemkab
4. Jumlah KDH/WKDH yang dibayarkan Dana Penunjang Operasional
KDH/WKDH

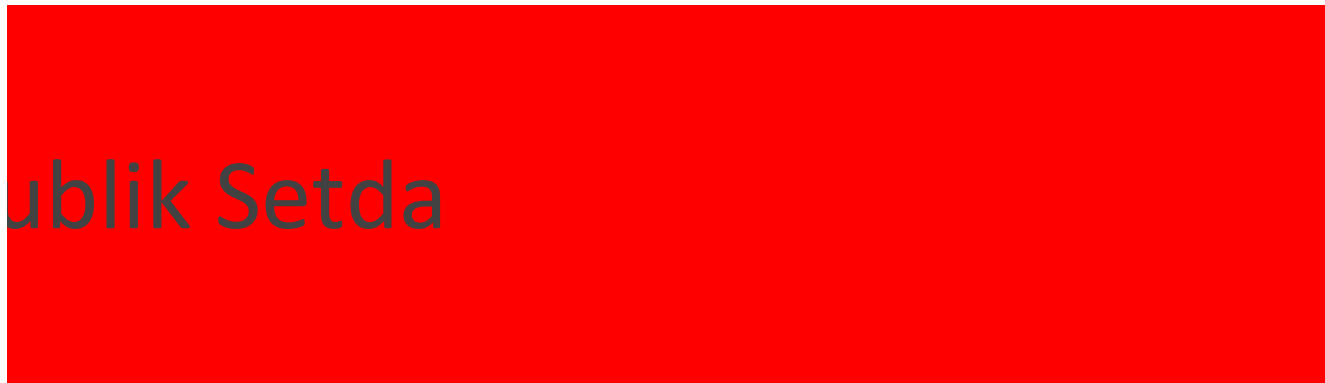
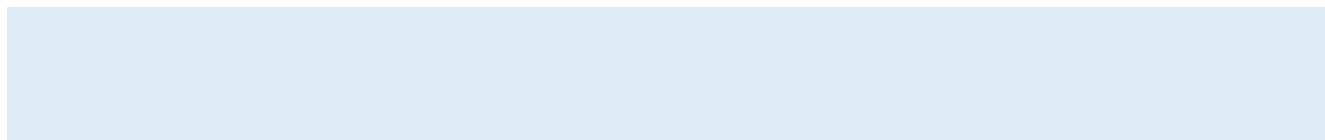
- 1. 12 Laporan**
- 2. 12 Laporan**
- 3. 12 Laporan**
- 4.24 Orang**

2.092.742.200,00

686.524.200,00

292.974.000,00

Pr



PROGRAM



Meningkatnya Pelayanan Umum

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

13.335.075.000,00

% Layanan umum yang terlaksana

100 Persen



1. Tersedianya Laporan SKM
2. Tersedianya Laporan Inovasi Pelayanan
3. Tersedianya Laporan Pengelolaan Website
4. Tersedianya Laporan Pengelolaan Pengaduan
5. Tersedianya Jasa Surat Menyurat
6. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Terspenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga KDH yang optimal
9. Terspenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga WKDH yang optimal
10. Terspenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat daerah yang optimal
11. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Tersedianya Peralatan Kantor
13. Terlaksananya medical chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah
15. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
9. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
10. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1. Jumlah Laporan SKM
2. Jumlah Laporan Inovasi Pelayanan
3. Jumlah Laporan Pengelolaan Website
4. Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan
5. Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Terfasilitasi
6. Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat
7. Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Jumlah laporan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
9. Jumlah laporan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
10. Jumlah laporan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan
11. Jumlah Bulan Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Kantor Yang Terpenuhi
13. Jumlah Orang yang mengikuti medical chek up kepala daerah dan wakil kepala daerah
14. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan
15. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

- 1. 1 Laporam**
- 2. 1 Laporan**
- 3. 2 Laporan**
- 4. 2 Laporan**
- 5. 2 Laporan**
- 6. 1 Laporan**
- 7. 1 Laporan**
- 8. 2 Laporan**
- 9. 2 Laporan**
- 10. 2 Laporan**
- 11. 12 Bulan**
- 12. 1 Laporan**
- 13. 6 Orang**
- 14. 9 Paket**
- 15. 1 Paket**
- 16. 3 Paket**
- 17. 4 Laporan**

95.000.000,00

4.167.550.000,00

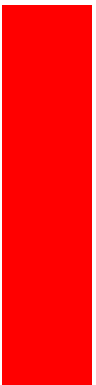
49.694.000,00

200.823.000,00

45.600.000,00

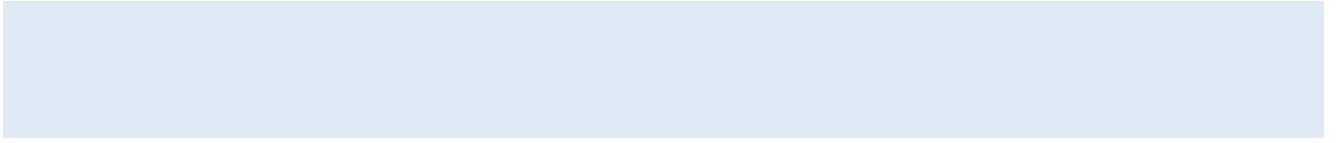
3.547.500.000,00

175.000.000,00
957.523.000,00
595.127.000,00
1.470.596.000,00
1.372.767.000,00
657.895.000,00
135.600.000
49.694.000
200.823.000
45.600.000



PEN





JUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

Meningkatnya Layanan Internal Setda

Indikator:

% Unsur layanan setda

80 Persen

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Setda

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

6.943.933.442,00

% Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas

100 Persen



1. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional atau Jabatan
2. Terlaksananya Pemeliharaan Mebel, Peralatan dan Mesin Kantor
3. Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional atau Jabatan
2. Jumlah Laporan Mebel, Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara
3. Jumlah Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor yang dipelihara

- 1. 141 Unit**
- 2. 2 Laporan**
- 3. 2 Laporan**

521.760.000,00

2.331.710.000,00

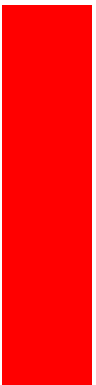
50.330.000,00

73.205.000,00

3.034.492.942,00

479.755.500,00

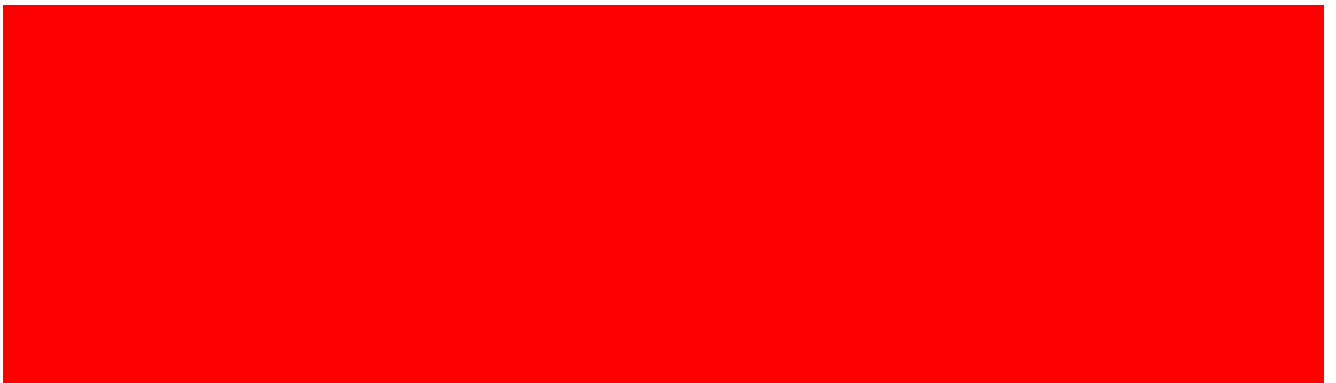
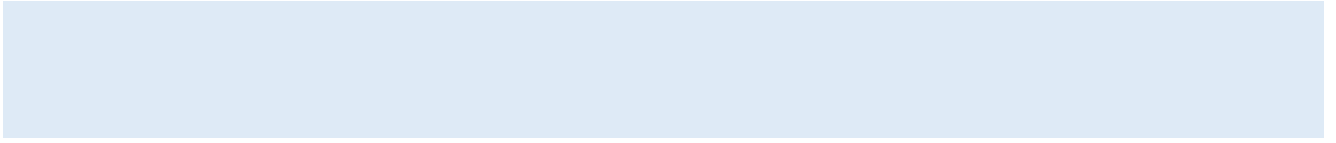
452.680.000,00



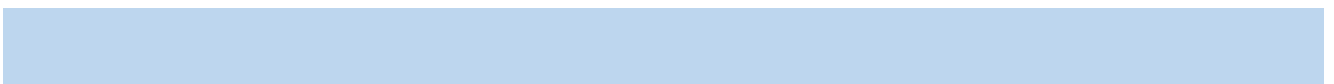
UPA



MUI



ATEN/KOTA



M

Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

7.859.769.000,00

% Paket Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan

100 Persen

1. Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional atau Jabatan
2. Tersedianya Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Kantor
3. Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4. Pengadaan Alat Besar
5. Pengadaan Mebel

1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional atau Jabatan
2. Jumlah Laporan Pengadaan Mebel Peralatan dan Mesin Kantor
3. Jumlah Laporan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor

- 1. 6 Unit
- 2. 2 Laporan
- 3. 2 Laporan

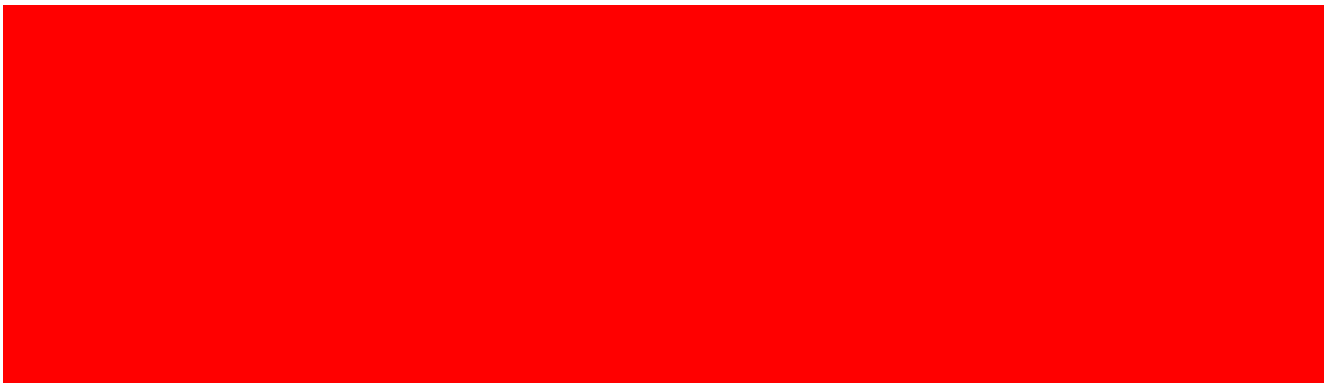
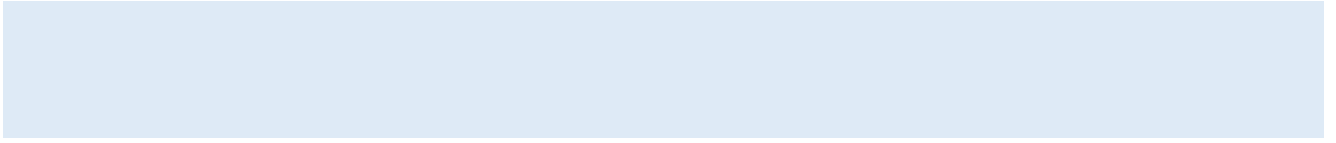
2.858.920.000,00

2.150.000.000,00

585.850.000,00

700.000.000

1.429.399.000





Lancarnya Administrasi Kepegawaian Setda

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

177.654.500,00

% Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas

100 Persen



1. Tersedianya Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan
2. Tersedianya Rencana Diklat
3. Tersedianya Dokumen IPA
4. Tersedianya Laporan Reward dan Punishment ASN
5. Tersedianya Laporan Penanganan Kode Etik
6. Tersedianya Laporan Penanganan Gratifikasi

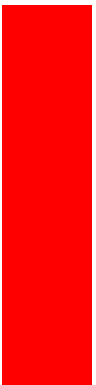
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan
2. Jumlah Laporan Rencana Diklat
3. Jumlah Dokumen IPA
4. Jumlah Laporan Pelaksanaan Reward dan Punishment ASN
5. Jumlah Laporan Penanganan Kode Etik
6. Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi

- 1. 1Laporan**
- 2. 2 Laporan**
- 3. 2 Laporan**
- 4. 2 Laporan**
- 5. 2 Laporan**
- 6. 2 Laporan**

82.029.500,00

95.625.000,00







Meningkatnya Akunt

Predikat S

BB/ K:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

Meningkatnya Kepatuhan

Indikator

Nilai IK

89,66 % /

Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, anggaran dan evaluasi Sekretariat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

128.153.900,00

% Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan

100 Persen

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
2. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3. Tersedianya Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
4. Terlaksananya Penginputan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
5. Terlaksananya Penginputan Sistem Informasi Evaluasi Perangkat Daerah
6. Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
7. Terlaksananya Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah

1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
4. % Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terinput sesuai ketentuan
5. Jumlah data capaian kinerja Bagian-Bagian diverifikasi dan terinput pada sistem
6. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
7. Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

1. 13 Dokumen
2. 19 Laporan
3. 1 Laporan
4. 100 Persen
5. 10 Bagian
6. 1 Laporan
7. 70 Data

41.785.000,00

28.495.400,00

37.382.000,00

8.821.500,00

11.670.000,00



Stabilitas Kinerja Setda

Sakip Setda

Kategori

PERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Manajemen dan Kinerja Intern Setda

Indikator:

IKI Setda

Kategori BB

PERENCANAAN DAN KEUANG

Terkoordinir Penyusunan Dokumen SPIP

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

37.382.000,00

% Dokumen SPIP sesuai ketentuan

100 Persen



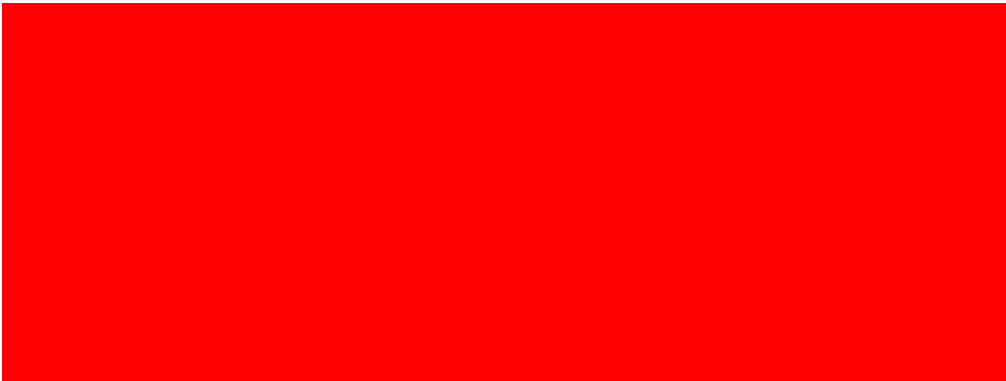
1. Tersedianya Dokumen Penunjang Evaluasi SPIP

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

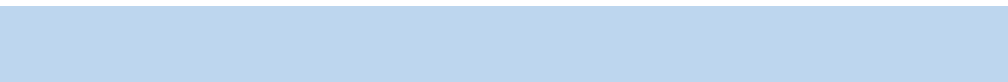
1. Jumlah Dokumen Penunjang Evaluasi SPIP

1. 1 Dokumenten

37.382.000,00



A



IAN

Tersusunnya Laporan Keuangan Setda

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

20.756.709.340,00

% Laporan Keuangan sesuai ketentuan

100 Persen

1. Terdapat Laporan penutupan kas
2. Terdapat Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan/Semester/Tahunan APBD
3. Terdapat Dokumen Laporan Keuangan SKPD (n-1) (audited)
4. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
5. Terlaksananya Transaksi Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
6. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Jumlah Laporan Penutupan Kas
2. Jumlah Dokumen/ Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan/Semester/Tahunan APBD
3. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD (n-1) (audited)
4. Jumlah Orang yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan
5. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
6. Jumlah KDH/WKDH yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan

1. 12 Laporan
2. 7 Dokumen
3. 1 Dokumen
4. 129 Orang
5. 12 Laporan
6. 24 Orang

19.599.400.000,00

921.709.500,00

16.750.000,00

22.816.000,00

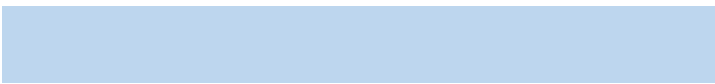
6.230.000,00

189.803.840,00

KINERJA JABATAN



**PK Sekretaris
Daerah**



PK Asisten

Terlaksananya Pengelolaan
BMD pada Setda

Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

PK Kabag

39.197.000,00

% Administrasi, Pengadaan dan
Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan

100 Persen

1. Tersedianya Dokumen RKBMD
2. Tersedianya Laporan Hasil Pengadaan Barang Perangkat Daerah
3. Tersedianya Dokumen Pencatatan Inventarisasi Barang
4. Tersedianya Laporan stock opname
5. Tersedianya Laporan Rekonsiliasi BMD

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

PK ess IV/ PK JF

1. Jumlah Dokumen RKBMD
2. Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Perangkat Daerah
3. Jumlah Dokumen Pencatatan Inventarisasi Barang
4. Jumlah Laporan stock opname
5. Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD

- 1. 2 Dokumen
- 2. 2 Laporan
- 3. 2 Dokumen
- 4. 12 Bulan
- 5. 4 Laporan

13.680.000,00

10.570.000,00

14.947.000,00